

**SINERGITAS PEMERINTAH DESA BERSAMA MASYARAKAT TERHADAP
PENEGAHAN NARKOBA**

Silva Syahraini¹, Ahmad Mustanir², Muhammad Rais Rahmat Razak³

^{1,2,3}Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Email Korespondensi: silvasyahrainiyaha1406@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of the research is to find out how the Synergy of the Village Government with the Community Towards Drug Prevention (Case Study in Teteaji Village) and the supporting and inhibiting factors in implementing the Synergy of the Village Government with the Community on Drug Prevention (Case Study in Teteaji Village). The data collection techniques used in this study are documentation, interviews, and literature studies. The data collected is then processed and analyzed using software analysis techniques such as Nvivo 12 plus. The use of this software allows the data that has been collected to be more structured, organized, and meaningful. Research Results This research focuses on the synergy between the village government and the community in drug prevention efforts in Teteaji Village. A qualitative approach is used to deeply understand how interaction and cooperation between the village government and the community can prevent drug abuse. The results of the study show that synergy built through effective communication, appropriate feedback, and trust, is very important in creating an environment that supports drug prevention. However, there are several obstacles, such as diverse levels of education and lack of information facilities, that hinder the effectiveness of this program. Therefore, a more personal and participatory approach is needed to increase public understanding and involvement in drug prevention programs. This research is expected to contribute to the development of more effective drug prevention strategies at the village level.

Keywords: Synergy, Drug, Prevention.

ABSTRAK

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana Sinergitas Pemerintah Desa Bersama Masyarakat Terhadap Pencegahan Narkoba (Studi Kasus di Desa Teteaji) dan faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan Sinergitas Pemerintah Desa Bersama Masyarakat Terhadap Pencegahan Narkoba (Studi Kasus di Desa Teteaji). Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, wawancara, dan studi pustaka. Data yang di kumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis perangkat lunak seperti Nvivo 12 plus. Penggunaan perangkat lunak ini memungkinkan data yang telah terkumpul menjadi lebih terstruktur, teratur, dan bermakna. Hasil penelitian Penelitian ini berfokus pada sinergitas antara pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya pencegahan narkoba di Desa Teteaji. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam bagaimana interaksi dan kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat dapat mencegah penyalahgunaan narkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas yang dibangun melalui komunikasi yang efektif, umpan balik yang tepat, dan kepercayaan, sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan narkoba. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti tingkat pendidikan yang beragam dan kurangnya sarana informasi, yang menghambat efektivitas program ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih personal dan partisipatif untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam program pencegahan narkoba. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan strategi pencegahan narkoba yang lebih efektif di tingkat desa.

Kata Kunci: Sinergitas, Narkoba, Pencegahan.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksi@governance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

PENDAHULUAN

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Desa, sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan, seringkali memiliki karakteristik yang berbeda dengan lingkungan perkotaan. Meskipun demikian, fenomena penyalahgunaan narkoba tidak mengenal batas wilayah, dan desa pun tidak luput dari dampak negatifnya. Kondisi ini menunjukkan perlunya kerjasama yang erat antara pemerintah desa dan masyarakat untuk menjalankan upaya pencegahan narkoba secara efektif. (Deliani, 2021). Tingginya tingkat keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan narkoba di desa menjadi landasan penting dalam pembentukan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman tentang bahaya narkoba, minimnya sarana dan prasarana, serta keterbatasan sumber daya manusia seringkali menjadi hambatan dalam implementasi program pencegahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama yang melibatkan peran aktif pemerintah desa dalam memberikan edukasi, menyediakan fasilitas kesehatan, serta membangun jejaring sosial yang kuat dengan masyarakat agar pencegahan narkoba di tingkat desa dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. (Herawati*, 2022).

Sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan berkualitas di tingkat lokal. Masyarakat perlu mendapatkan perhatian, dukungan, dan pengawasan oleh orang tua terhadap anaknya agar terhindar dari penggunaan narkoba. Kaum anak-anak dan remaja perlu mendapatkan perhatian khusus serta bimbingan agar anak-anak dan remaja dapat berhati-hati dalam pergaulan sehari-harinya dan menghindari narkoba. Selain menghindari dari penyalahgunaan narkoba juga perlu membiasakan masyarakat dalam hidup sehat dan bersih. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggarisbawahi berbagai langkah strategis yang dirancang untuk memberikan dampak psikologis yang kuat kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencegah individu-individu agar tidak terlibat dalam tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menetapkan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan sebelumnya. (Fauziah & Megawati, 2024).

Peningkatan ancaman pidana ini mencakup hukuman minimum dan maksimum yang lebih ketat, disesuaikan dengan tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Langkah ini diambil untuk menekankan betapa seriusnya dampak negatif narkotika terhadap individu dan masyarakat. Dengan ancaman hukuman yang berat, diharapkan masyarakat akan berpikir dua kali sebelum terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan narkotika. Selain itu, undang-undang ini juga mempertimbangkan dampak luas dari penyalahgunaan narkotika terhadap ketahanan keamanan nasional. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya merusak kesehatan individu tetapi juga dapat melemahkan struktur sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas dan keamanan negara. Oleh karena itu, langkah-langkah preventif yang kuat dan hukuman yang tegas dianggap sangat diperlukan. Dalam kerangka tersebut, pemerintah melalui undang-undang ini berusaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur.

Langkah-langkah hukum yang ketat diharapkan dapat menekan angka penyalahgunaan narkotika dan mengurangi peredaran gelapnya. Pendidikan dan sosialisasi mengenai bahaya narkotika juga diperkuat untuk menambah wawasan masyarakat mengenai risiko yang dihadapi. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menekankan pentingnya penegakan hukum yang kuat sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman narkotika. Dengan adanya ancaman pidana yang lebih berat dan strategi preventif yang komprehensif, undang-undang ini diharapkan dapat menjadi benteng yang kokoh dalam memerangi masalah narkotika di Indonesia, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan aman. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang terjadi dari waktu ke waktu di masyarakat menunjukkan gejala yang sangat mengkhawatirkan. Gejala ini dapat dilihat dari

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

semakin meluasnya wilayah penyebaran dan peredaran narkoba serta semakin beragamnya pengguna narkoba dari berbagai lapisan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa narkoba adalah zat yang dapat merusak syaraf otak manusia dan menyebabkan sindroma ketergantungan pada penggunaannya. Penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan bahaya yang signifikan bagi penggunaannya. Bahaya ini tidak hanya terbatas pada kerusakan kesehatan fisik dan mental, tetapi juga dapat berujung pada kematian. Dampak fatal ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman yang ditimbulkan oleh narkoba terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan kasus penyalahgunaan narkoba, telah dilakukan langkah tegas dengan membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN memiliki tanggung jawab utama dalam menangani dan memberantas kasus penyalahgunaan narkoba di seluruh Indonesia. Keberadaan BNN menunjukkan komitmen pemerintah untuk memerangi narkoba secara terorganisir dan sistematis. Dalam menjalankan tugasnya, BNN memerlukan dukungan kelembagaan lain yang juga berperan dalam proses penanggulangan kasus penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) adalah contoh dari lembaga yang bekerja sama dengan BNN. Selain itu, kerjasama dengan kepolisian, LSM, Dinas Kesehatan, serta unit lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek penanggulangan dan pemberantasan narkoba dapat dilaksanakan dengan efektif. Kolaborasi antara berbagai lembaga ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam menangani penyalahgunaan narkoba. Masing-masing lembaga dapat saling mengisi, membantu, dan melengkapi satu sama lain dalam pelaksanaan tugas tertentu. Dengan adanya kerjasama yang erat, upaya penanggulangan dan pemberantasan narkoba di Indonesia dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan efisien, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan aman.

Dalam upaya untuk lebih mengefektifkan proses pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat peran Badan Narkotika Nasional (BNN). Penguatan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang BNN, Badan Narkotika Provinsi (BNP), dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK). Peraturan ini menetapkan bahwa BNN, BNP, dan BNK merupakan mitra kerja yang memiliki tanggung jawab kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota, sesuai dengan tingkat pemerintahan masing-masing. Penguatan peran BNN bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas dalam pencegahan dan penanganan kasus narkoba di seluruh Indonesia. BNN sebagai lembaga pusat memiliki tanggung jawab besar dalam merumuskan kebijakan nasional dan memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik. BNP dan BNK, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

Peran yang diperkuat ini memungkinkan BNN, BNP, dan BNK untuk bekerja lebih sinergis dan responsif terhadap dinamika penyalahgunaan narkoba di berbagai daerah. Dengan demikian, setiap wilayah dapat mengadopsi pendekatan yang paling efektif dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba, berdasarkan situasi dan tantangan spesifik yang dihadapinya. Selain itu, keterlibatan langsung dari pemerintah daerah melalui BNP dan BNK memastikan bahwa upaya penanggulangan narkoba dapat dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Gubernur dan Bupati/Walikota yang bertanggung jawab langsung atas BNP dan BNK dapat memberikan dukungan yang lebih kuat, baik dari segi kebijakan maupun sumber daya, untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di daerah mereka.

Dengan demikian, komitmen pemerintah untuk menguatkan peran BNN, BNP, dan BNK berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 mencerminkan upaya serius dalam menghadapi masalah narkoba di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program pencegahan dan pemberantasan narkoba, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat. Penyalahgunaan narkoba dapat lebih efektif dicegah dengan memberikan peringatan yang jelas tentang bahaya dan dampak negatif dari penggunaan narkoba kepada masyarakat.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Dengan demikian, masyarakat dapat mempertimbangkan pilihan mereka dengan lebih bijak, apakah akan mengorbankan hidup mereka dengan menggunakan narkoba atau memilih untuk hidup sehat dan mewujudkan cita-cita mereka tanpa narkoba. Penyuluhan tentang bahaya narkoba harus dilakukan secara lebih intensif dan tegas, dengan menekankan konsekuensi serius dari penggunaan narkoba. Hal ini tidak hanya membahayakan kesehatan dan keselamatan pengguna, tetapi juga dapat berdampak buruk pada orang lain di sekitar mereka. Misalnya, tindakan kriminal atau kecelakaan yang disebabkan oleh pengguna narkoba dapat merugikan banyak orang. Kampanye penyuluhan ini perlu dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media massa, media sosial, dan kegiatan langsung di komunitas-komunitas. Informasi yang disampaikan harus menggugah kesadaran masyarakat tentang risiko nyata yang ditimbulkan oleh narkoba, termasuk potensi kecanduan, kerusakan otak, gangguan mental, dan kematian.

Selain itu, keterlibatan berbagai pihak dalam penyuluhan ini sangat penting. Pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan keluarga semuanya memiliki peran dalam mendidik dan mencegah penyalahgunaan narkoba. Program-program pendidikan dan pelatihan tentang bahaya narkoba harus menjadi bagian dari kurikulum sekolah dan kegiatan masyarakat. Dengan adanya penyuluhan yang gencar dan informatif, diharapkan masyarakat akan lebih sadar dan waspada terhadap bahaya narkoba. Mereka akan memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat dan menjauhkan diri dari penggunaan narkoba. Dengan demikian, upaya pencegahan ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi semua lapisan masyarakat.

Peran masyarakat sangat penting dalam upaya pemberantasan narkoba. Keikutsertaan aktif masyarakat diperlukan untuk menyatakan perang terhadap narkoba. Pemberantasan narkoba bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga harus melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Salah satu langkah paling krusial adalah adanya penolakan langsung dari masyarakat terhadap segala bentuk kejahatan narkoba. Partisipasi masyarakat tidak hanya berhenti pada penolakan, tetapi juga meliputi pengawasan aktif terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan tempat tinggal mereka. Masyarakat dapat berperan sebagai mata dan telinga bagi aparat penegak hukum dengan melaporkan aktivitas yang mencurigakan atau adanya indikasi penyalahgunaan narkoba. Pengawasan ini sangat membantu dalam mencegah penyebaran narkoba lebih luas dan memberikan dukungan bagi upaya pemberantasan yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait. Selain pengawasan, masyarakat juga dapat terlibat dalam edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya narkoba. Dengan meningkatkan kesadaran tentang dampak buruk narkoba, masyarakat dapat membangun ketahanan diri dan lingkungan terhadap godaan dan ancaman narkoba. Edukasi ini bisa dilakukan melalui berbagai forum, seperti pertemuan warga, kegiatan keagamaan, dan media sosial.

Dukungan dari komunitas, seperti kelompok pemuda, organisasi keagamaan, dan LSM, juga sangat penting dalam upaya pemberantasan narkoba. Kelompok-kelompok ini dapat mengadakan kegiatan positif yang mengalihkan perhatian dari aktivitas yang berisiko, serta memberikan dukungan moral dan material bagi mereka yang berusaha pulih dari ketergantungan narkoba. Secara keseluruhan, keterlibatan aktif masyarakat dalam pemberantasan narkoba akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari narkoba. Dengan kolaborasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum, upaya pemberantasan narkoba dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh, sehingga tercipta masyarakat yang sehat dan sejahtera.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam, kompleks, dan kontekstual. Pada dasarnya, penelitian ini fokus pada pemahaman makna yang terkandung dalam fenomena yang diteliti, baik itu dalam bentuk kata-kata, tindakan, atau interaksi antarindividu. Berbeda dengan penelitian kuantitatif

Penerbit:

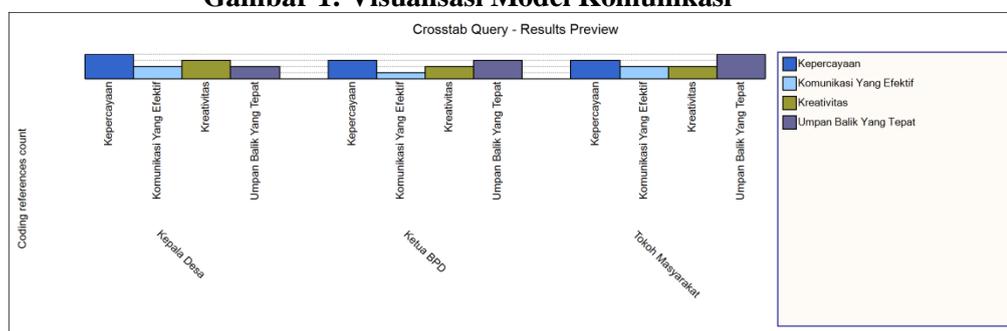
LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

yang menekankan pengukuran dan analisis data numerik, penelitian kualitatif lebih menekankan pada interpretasi dan pemahaman mendalam. Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti: Studi Kepustakaan, Wawancara, Dokumentasi. Teknik analisis data yang telah terkumpul dapat dilakukan dengan bantuan perangkat lunak seperti Nvivo. Penggunaan perangkat lunak ini memungkinkan data yang telah terkumpul menjadi lebih terstruktur, teratur, dan bermakna. Dengan demikian, analisis data menjadi lebih efisien dan mendalam.

PEMBAHASAN

Model Komunikasi Informan

Gambar 1: Visualisasi Model Komunikasi



Sumber: Hasil Analisis N-Vivo 12 Plus, 2024

Kepercayaan tampaknya menjadi nilai universal yang diakui penting oleh semua kelompok. Jumlah referensi yang cukup besar dari ketiga kelompok menunjukkan bahwa kepercayaan adalah fondasi utama dalam hubungan kerja dan interaksi antara mereka. Hal ini bisa berarti bahwa untuk Kepala Desa, Ketua BPD, dan Tokoh Masyarakat, membangun kepercayaan adalah langkah pertama dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif.

Komunikasi Yang Efektif lebih banyak disoroti oleh Kepala Desa, yang mungkin mencerminkan peran mereka sebagai pemimpin lokal yang perlu memastikan pesan dan instruksi yang jelas kepada warga dan staf. Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam menjalankan tugas administratif dan menyampaikan kebijakan dengan benar kepada masyarakat. Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat juga mengakui pentingnya komunikasi, namun dengan referensi yang lebih rendah, ini bisa menandakan bahwa mereka mungkin lebih fokus pada aspek lain dalam tugas mereka. Kreativitas menunjukkan distribusi referensi yang lebih seimbang, namun dengan jumlah yang lebih rendah dibandingkan kategori lain. Ketua BPD mencatat referensi tertinggi, menunjukkan bahwa mereka mungkin mengadopsi pendekatan yang lebih inovatif dalam menyelesaikan masalah atau menjalankan proyek. Kepala Desa tampaknya kurang menekankan kreativitas, yang mungkin disebabkan oleh peran mereka yang lebih struktural dan formal.

Umpan Balik Yang Tepat paling banyak diakui oleh Tokoh Masyarakat, yang mungkin mengindikasikan peran mereka sebagai penghubung antara pemerintah dan warga. Umpan balik yang tepat sangat penting bagi mereka untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Referensi yang lebih sedikit dari Kepala Desa dan Ketua BPD menunjukkan bahwa mereka mungkin lebih fokus pada penerapan kebijakan daripada menilai atau mengevaluasi umpan balik secara aktif. Secara keseluruhan, grafik ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana setiap kelompok memberikan prioritas yang berbeda pada nilai-nilai tertentu berdasarkan peran dan tanggung jawab mereka. Kepala Desa lebih condong pada komunikasi efektif dan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



kepercayaan, Ketua BPD menyoroti kreativitas, sedangkan Tokoh Masyarakat sangat menghargai umpan balik yang tepat. Memahami preferensi ini penting untuk meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar kelompok, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas mereka masing-masing.

Gambar 2: Indikator Sinergitas

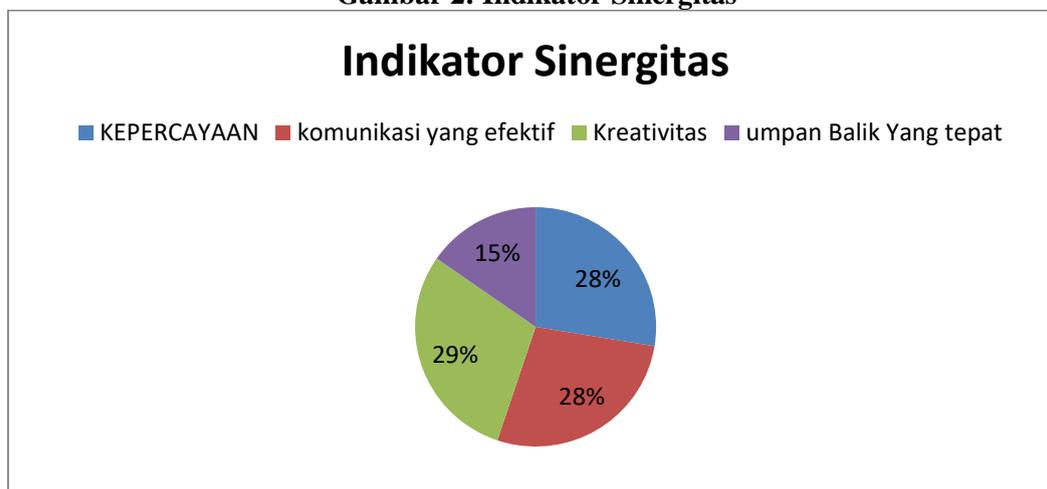


Diagram ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang komponen-komponen kunci yang mendasari sinergitas dalam sebuah tim atau organisasi. Setiap elemen yang ditampilkan memiliki peran vital dalam menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan produktif.

Kepercayaan (28%): Kepercayaan merupakan fondasi yang tak tergantikan dalam setiap tim. Ketika anggota tim saling percaya, mereka cenderung lebih terbuka dalam berbagi informasi, lebih siap untuk berkolaborasi, dan lebih percaya diri dalam mengambil risiko yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Kepercayaan memungkinkan anggota tim untuk merasa aman dalam mengemukakan ide-ide mereka, bahkan jika ide tersebut belum sepenuhnya matang. **Komunikasi yang Efektif (28%):** Sejalan dengan kepercayaan, komunikasi yang efektif memastikan bahwa setiap anggota tim memahami tujuan, peran, dan tanggung jawab mereka. Ini juga mencakup kemampuan untuk mendengarkan secara aktif, memberikan umpan balik yang jelas, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan miskomunikasi dan ketidakpahaman, yang pada gilirannya dapat merusak sinergi tim.

Kreativitas (29%): Dengan bobot tertinggi dalam diagram ini, kreativitas dianggap sebagai pendorong utama inovasi dan adaptasi. Kreativitas tidak hanya terbatas pada penciptaan ide baru, tetapi juga pada kemampuan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan menemukan cara-cara baru untuk memecahkan tantangan yang ada. Dalam tim yang sinergis, kreativitas memungkinkan pengembangan solusi yang lebih baik dan lebih efisien. **Umpan Balik yang Tepat (15%):** Meskipun memiliki persentase yang lebih kecil, umpan balik yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anggota tim terus berkembang. Umpan balik yang konstruktif membantu individu untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka, dan memberikan panduan tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja mereka. Pentingnya umpan balik juga terletak pada kemampuannya untuk menjaga dinamika tim tetap sehat dan seimbang.

Selain itu, diagram ini juga mengindikasikan bahwa sinergitas adalah hasil dari interaksi dinamis antara berbagai elemen ini. Tidak ada satu pun elemen yang berdiri sendiri; keberhasilan sinergitas bergantung pada bagaimana semua faktor ini saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Oleh karena itu, tim atau organisasi yang ingin mencapai sinergitas optimal perlu secara terus-menerus

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



mengelola dan mengembangkan keempat aspek ini, memastikan bahwa tidak ada elemen yang terabaikan atau dianggap kurang penting.

KESIMPULAN

Kesimpulan mengenai sinergitas dalam upaya pencegahan penggunaan narkoba di desa serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Sinergitas Belum Mampu Secara Optimal Mencegah Penggunaan Narkoba: Meskipun sinergitas antara pemerintah desa dan masyarakat telah terjalin, upaya ini masih belum mampu sepenuhnya mencegah penggunaan narkoba di desa. Beberapa faktor internal dan eksternal, seperti kurangnya sumber daya, keterbatasan akses terhadap informasi, dan pengaruh lingkungan luar, menyebabkan sinergitas yang ada tidak cukup kuat untuk menghadapi tantangan besar seperti penyalahgunaan narkoba. **Faktor Pendukung Sinergitas:** **Keterlibatan Aktif Masyarakat:** Adanya partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk tokoh masyarakat dan pemuda, dalam program-program pencegahan narkoba, menjadi faktor kunci yang mendukung keberhasilan sinergitas. **Dukungan dari Pemerintah:** Kebijakan pemerintah yang mendukung, baik di tingkat lokal maupun nasional, serta alokasi anggaran yang memadai, juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. **Adanya Pendidikan dan Sosialisasi:** Program pendidikan dan sosialisasi yang berkelanjutan tentang bahaya narkoba sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat.

Faktor Penghambat Sinergitas: **Kurangnya Sumber Daya:** Terbatasnya sumber daya, baik dari segi finansial maupun manusia, menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan program pencegahan narkoba yang efektif. **Kurangnya Koordinasi:** Masih terdapat kendala dalam hal koordinasi antara berbagai pihak, termasuk antara pemerintah desa, organisasi masyarakat, dan pihak kepolisian, yang mengakibatkan program pencegahan narkoba tidak berjalan dengan optimal. **Stigma dan Rendahnya Kesadaran:** Stigma negatif terhadap pengguna narkoba serta rendahnya kesadaran akan pentingnya pencegahan narkoba di kalangan masyarakat tertentu membuat upaya sinergi seringkali tidak mendapat dukungan penuh.

Untuk meningkatkan efektivitas sinergitas dalam pencegahan narkoba, perlu dilakukan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan alokasi sumber daya, dan intensifikasi program pendidikan serta sosialisasi yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Selain itu, penghapusan stigma terhadap pengguna narkoba dan peningkatan kesadaran masyarakat juga penting agar sinergitas yang ada dapat memberikan dampak yang lebih signifikan.

REFERENSI

- Deliani, D. (2021). Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak-Anak. *Juripol*, 4(2), 49–55. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11114>
- Donny Prasetyo1, I. (2020). MEMAHAMI MASYARAKAT DAN PERSPEKTIFNYA. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 506–515. <https://doi.org/10.38035/JMPIS>
- Fajri, R., Setyowati, E., & Siswidiyanto. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) (. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(7), 1099–1104.
- Fauziah, N. L., & Megawati, W. (2024). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Berdasarkan Uu No 35 Tahun 2009 (Studi Putusan 05/Pid.Sus-Anak/2015). *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 7(1), 48–65. <https://doi.org/10.47080/propatria.v7i1.3199>
- Herawati*, I. R. H. A. T. Y. N. R. (2022). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA MELALUI PROGRAM DESA BERSINAR TAHUN 2022 (STUDI. *γ787*, 2022(8.5.2017), 2003–2005. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>
- Kurniawan, J. A. (2017). Sinergitas antar Stakeholders dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 1 September 2024

(RTH) Taman Kota di Kota Temanggung. *Jurnal Wacana Publik*, 1(1), 39–45.

Mustanir, A., Sellang, K., Ali, A., Madaling, M., & Mutmainna, M. (2018). Peranan Aparatur Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Tonrongge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG)*, 2(1), 67–84.

<http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/clean/article/view/213>

Surbakti, V. M. B. (2022). *Gaya Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Kinerja Aparatur Desa (Studi Kasus di Desa Susuk, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo)*.

<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/18275%0Ahttps://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/18275/1/188520116> - Via Maharani Br Surbakti - Fulltext.pdf

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX

